

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- G.Kertasapoetra, dkk, 1985, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bima Aksara, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Oloan Sitorus, 2006, *Kebijakan Tanah Kapita Selekt Perbandingan Hukum Indonesia*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Rosmidah, 2010, *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Dan Hambatan Implementasinya*, Skripsi, Universitas Jambi.
- Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, CV. Budi Utama, Depok.
- Salim H.S., 2006. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Bandung.
- Sukirno, 2018, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Surojo Wignjodiporo, 2010, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ter Haar Bzn, 1994, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Cet Kesebelas, Terjemahan R. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita.
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok Agraria*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu*.

Surat Keputusan Bupati Nomor 384 Tahun 2019 tentang *Pengakuan Dan Perlindungan Uma Saureinu di Desa Saureinu Kecamatan Sipora Selatan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai*.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Pengakuan dan Perlindungan UMA (Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Mentawai) Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai*

### **C. Sumber Lain**

Abdon Nababan, 2013, *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat : Antara Konsep dan Realitas, Makalah dalam Seminar Hutan Tanam Rakyat Untuk Apa dan Siapa*. [https://www.bphn.go.id/data/documents/peran masyarakat hukum adat 171213.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/peran_masyarakat_hukum_adat_171213.pdf)

Abdurahman & Wentzel , *Konsep Untuk Menyelesaikan Masalah Statatus Tanah Masyrakat Di Kawasan Hutan Pada Areal HPH dan HPHTI di Provinsi Kalimantan Timur, GTZ-MoF. SFMP Jurnal*, Volume 11, Nomor 24 Juni 1999.

Alting Hussen, 2011, *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat : Suatu Kajian terhadap Masyarakat Hukum Ternate, Jurnal Dinamika Hukum* Volume 11 Nomor 1 Januari 2016.  
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/75/32>

Anonim, 2014, *Hak Ulayat Masyarakat Papua*, <https://jayapura.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/Hak-Ulayat-Papua>.

Anonim, 2018, *Konsep Hak Ulayat Masyarakat Adat*, <https://www.quareta.com/post/konsep-hak-ulayat-masyarakat-adat>.

- Fokky Fuad, 2016, *Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Agraria di Indonesia*, <https://fh.uai.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Keberadaan-Hak-Ulayat>.
- Mahyuni, 2015, *Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Adat Serta Hak-Hak Tradisional nya di Provinsi Kalimantan Selatan*, Makalah, <http://wahyunish.blogspot.com/2013/09/makalah-pengakuan-dan-penghormatan>.
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012, *Perspektif Hukum dan Hak-Hak Konstitusional nya*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/penelitian/pdf/2-penelitian%20MHA-upload.pdf>.
- Valeria M.P Siringoringo, 2016, *Pengaturan Perlindungan Hukum Dan Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat Terkait Resistensi Pembangunan: Studi Kasus Masyarakat Adat Tobelo, Maluku Utara*, *Jurnal Gema Keadilan* Volume 3, Nomor 1 Agustus 2017, hlm 36-47, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3640>